

**PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BADAN PERMUSYARATAN DESA
(BPD) MELALUI PENDEKATAN *WORKSHOP*
DI KECAMATAN TARUMAJAYA KABUPATEN BEKASI**

***INCREASING THE CAPACITY OF VILLAGE CONSULTANCY BOARD (BPD)
MEMBERS THROUGH A WORKSHOP APPROACH IN TARUMAJAYA DISTRICT
BEKASI REGENCY***

Aos Kuswandi*, Rina Susanti Hartono, Siti Nuraini

Prodi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam 45

*Email: koeswandi.all@gmail.com

(Diterima 12-08-2023; Disetujui 16-09-2023)

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra sejajar pemerintah desa, memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu tugasnya adalah merumuskan dan menetapkan peraturan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil analisis dari kegiatan program peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pendekatan *workshop* di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk *workshop*, diskusi kelompok, studi kasus, dan tanya jawab secara interaktif. Hasil analisis dari pelaksanaan kegiatan menyimpulkan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pendekatan *workshop* berhasil meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pengetahuan dan pemahaman yang dicapai termasuk kategori tinggi. Hal tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah desa dan pemerintah kecamatan sehingga kegiatan serupa perlu dilaksanakan kembali dengan penambahan materi berupa praktik yang terkait dengan materi yang diberikan. Saran penting yang perlu diperhatikan adalah perlunya penambahan materi dari praktisi terkait, perlunya kegiatan praktik langsung dan memerlukan dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan dalam fasilitasi kegiatan selanjutnya.

Kata Kunci: Peningkatan Kapasitas; Anggota Badan Permusyawaratan Desa; Pemerintahan Desa; Pendekatan *Workshop*

ABSTRACT

The Village Consultative Body (BPD) as an equal partner of the Village Government, has very important duties and functions in the administration of Village Administration. One of his duties is to formulate and stipulate Village Regulations according to the needs of the community. This paper aims to describe the results of an analysis of the capacity building program activities for BPD members through a workshop approach in Tarumajaya District, Bekasi Regency. Activities carried out in the form of workshops, group discussions, case studies and interactive questions and answers. The results of the analysis of the implementation of the activities concluded that the capacity building activities for BPD members through a workshop approach succeeded in increasing the knowledge, understanding and skills of BPD members in carrying out their duties and functions. The knowledge and understanding achieved is in the high category. This received appreciation from the village government and sub-district government so that similar activities need to be carried out again with additional material in the form of practices related to the material provided. Important suggestions that need to be considered are the need for additional materials from related practitioners, the need for hands-on practical activities and the need for support from the local government and sub-district governments in facilitating further activities.

Keywords: Capacity Building; Members of the Village Consultative Council; Village Administration; *Workshop approach*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keduanya adalah mitra sejajar pada pelaksanaan tugas dan

fungsi dalam pemerintahan desa. Sesuai dengan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, didalamnya diatur juga tentang BPD. Baik Pemerintahan Desa maupun BPD, masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desanya sesuai dengan kebutuhan, potensi dan kehendak masyarakat yang bersangkutan. Pengaturan hal tersebut akan dituangkan dalam kebijakan pemerintahan desa, baik berupa Peraturan Desa (Perdes) maupun Peraturan Kepala Desa.

Sebagai mitra sejajar bagi pemerintah desa, BPD dituntut kemampuannya yang kompeten agar mampu menyeimbangkan dalam menampung aspirasi masyarakat dan menjembatani pemerintahan desa dalam menyusun, merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan peraturan desa. Tuntutan kapastias BPD tersebut sangat wajar, agar dihasilkan kebijakan pemerintahan desa yang baik. Suryadi Wowor (2015) menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Salah satu keberhasilan pemerintahan desa atau dianggap sukses adalah jika mengoptimalkan *input* atau segala sumber daya yang ada di desa secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan *output* secara produktif. Dalam simpulan Muhtadli dkk (2022) menyatakan bahwa BPD bukan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa, namun merupakan mitra kepala desa dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, jelas bahwa BPD sebagai mitra kepala desa dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BPD sebagai lembaga perwakilan desa yang memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan desa menghadapi beberapa permasalahan. Nurpitasari dan Maharani (2020) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa BPD merupakan lembaga desa yang memiliki fungsi legislasi yaitu membentuk peraturan desa, namun peran BPD dalam membentuk produk hukum tersebut belum kuat. Temuan Umami Natijah dan Afriva Khaidir (2019) menyimpulkan bahwa BPD tidak optimal dalam melakukan pola komunikasi dengan masyarakat sehingga pesan yang akan disampaikan baik oleh BPD maupun masyarakat tidak tersampaikan dengan baik. Dari hasil pengamatan sementara pada objek di Kabupaten Bekasi mengindikasikan terdapat beberapa permasalahan yang sering muncul terkait BPD antara lain:

- 1) Kurangnya pemahaman tentang peran dan fungsi BPD, beberapa anggota BPD dan masyarakat desa masih kurang memahami peran dan fungsi BPD secara baik. Hal ini dapat menghambat efektivitas kinerja BPD dalam menjalankan tugasnya.

- 2) Kurangnya kapasitas anggota BPD, karena seringkali BPD diisi oleh warga desa yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pemerintahan. Kurangnya kapasitas ini dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program di desa.
- 3) Keterbatasan sumber daya, dalam hal ini BPD seringkali mengalami keterbatasan sumber daya, baik itu dalam hal anggaran, infrastruktur, atau tenaga kerja. Keterbatasan ini dapat menghambat kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka secara optimal.

Memperhatikan dari beberapa permasalahan BPD yang dikemukakan di atas maka menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD. Artinya perlu dilakukan berbagai upaya pada setiap desa-desa seperti pendidikan dan pelatihan, *workshop* dan sejenisnya, dalam hal ini memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan peran BPD kepada anggota BPD. Pelatihan ataupun *workshop* dapat mencakup pemahaman tentang hukum, tata cara pengambilan keputusan, manajemen administrasi, dan keterampilan komunikasi. Upaya ini merupakan suatu cara agar BPD memiliki kapasitas yang cukup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kegiatan lain yang dapat dilakukan juga melalui pembinaan dan pendampingan. Dalam kegiatan ini memberikan pembinaan dan pendampingan kepada anggota BPD, baik melalui pemberian bimbingan teknis maupun pendampingan langsung. Pendampingan dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Pada kegiatan program penguatan kapasitas anggota BPD sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seperti yang dilaksanakan oleh Zitri, Rifaid dan Umami (2022) bahwa peningkatan kapasitas BPD merupakan aspek penting untuk meningkatkan performa anggota BPD dalam menjalankan tugas. Peningkatan kapasitas anggota BPD merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi BPD atau masyarakat yang bertujuan untuk menganalisa lingkungannya, mengidentifikasi masalah, isu-isu, ataupun peluang dengan merancang sebuah strategi yang efektif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dengan alasan masih sering ditemuinya lemahnya kualitas anggota BPD maupun kelembagaan BPD. Pada sisi lain ternyata hubungan kelembagaan antara pemerintah desa dengan BPD merupakan hal penting dalam menghasilkan produktivitas regulasi oleh BPD. Ndraha, Ndraha dan Telaubanua (2022) menyimpulkan bahwa kerja sama antar BPD dan pemerintah desa diperlukan. Model kerja sama yang dilakukan bisa dimulai dengan adanya komunikasi yang baik antara BPD dengan pemerintah desa. Komunikasi yang dimaksud berupa komunikasi kemitraan.

Terkait dengan pentingnya penguatan dan peningkatan kapasitas anggota BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, hasil penelitian dari Prihatin (2016) menyimpulkan bahwa penguatan peran BPD untuk membawa aspirasi tersebut menjadi hal yang sangat vital agar kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian jelas bahwa sangat penting dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan dan memberikan penguatan kapasitas anggota BPD. Kegiatan pendampingan dan bimbingan teknis yang pernah dilakukan oleh Ifrani (2022) menyimpulkan bahwa kegiatan bimbingan teknis bagi anggota BPD bermanfaat dan berguna dalam menunjang kinerja sebagai BPD, kepala desa serta aparat desa.

Berdasarkan deskripsi di atas, tulisan ini bertujuan untuk memberikan deskripsi dan analisis atas program penguatan anggota BPD dari seluruh desa di Kecamatan Tarumaja Kabupaten Bekasi. Analisis dengan memperhatikan temuan dan pembahasan atas pendekatan model *workshop* pada peserta sebagai objek program.

BAHAN DAN METODE

Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Camat Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. Kegiatan dilakukan pada kelompok sasaran utama anggota BPD pada desa-desa di wilayah Kecamatan Tarumaja Kabupaten Bekasi. Karena kegiatan ini bersifat kolaboratif, maka yang menjadi sasaran berikutnya adalah aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat UMKM, dan penggerak pendidikan.

Metode dan pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan ini berbentuk kegiatan *workshop*. Dalam hal ini, walaupun sasaran utamanya adalah anggota BPD, namun terdapat empat sasaran pendukung yang penting untuk dilibatkan seperti, pemerintahan desa, pengusaha (UMKM), tokoh masyarakat dan penggerak pendidikan. Metode dan pendekatan yang dipergunakan pada program pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

- 1) *Workshop*, pada sesi ini memberikan pelatihan dan *workshop* yang relevan dengan peran dan tugas BPD, seperti kepemimpinan, manajemen keuangan desa, pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan desa, dan keterampilan komunikasi.
- 2) Pengetahuan Penggunaan Teknologi Informasi, pada sesi ini memberikan materi tentang pentingnya memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi anggota BPD dan mitra kerja lainnya. Disampaikan mengenai pentingnya aplikasi berbasis mobile untuk memberikan materi pelatihan dan sumber daya pendukung kepada anggota BPD. Hal ini akan memudahkan akses dan meningkatkan fleksibilitas dalam pembelajaran bagi anggota BPD dan mitra kerja lainnya.

- 3) Evaluasi dan Umpan Balik, dalam hal ini setelah pemberian materi dalam *workshop* tim pemateri dan pelaksana program, melakukan evaluasi atas materi yang diberikan BPD dan memberikan umpan balik kepada anggota BPD. Evaluasi ini dilakukan melalui tanya jawab dan berbagai pandangan dari peserta dan tanaaggapan dari tim program untuk menilai pencapaian tujuan, identifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan pada program lanjutan.

Adapun deskripsi kegiatan yang dilakukan pada program pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penguatan kapasitas anggota BPD adalah sebagai berikut:

- 1) Pengantar dan Pembekalan dari Tim Program Pengabdian MAsyarakat :
 - a. Sesi pengantar untuk memperkenalkan tujuan, manfaat, dan harapan dari *workshop* kepada peserta.
 - b. Pembekalan tentang peran, tugas, dan tanggung jawab BPD dalam pengelolaan pemerintahan desa.
 - c. Penyampaian informasi terkait aspek hukum, regulasi, dan panduan yang mengatur BPD
- 2) Materi Substansi
 - a. *Workshop* mengenai prinsip tata kelola desa yang baik dan praktik terbaik dalam pengelolaan desa.
 - b. Pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan pembangunan desa, perencanaan, dan penganggaran
 - c. Pengetahuan tentang perencanaan strategis, pengembangan visi-misi desa, dan penilaian kebutuhan masyarakat
 - d. Pengetahuan dalam manajemen keuangan desa, pelaporan keuangan, dan pengawasan anggaran desa
 - e. Pengetahuan kepemimpinan untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan anggota BPD.
 - f. Pembelajaran tentang komunikasi efektif, termasuk komunikasi antar anggota BPD, dengan pemerintah daerah, dan dengan masyarakat
 - g. Pengetahuan dan keterampilan negosiasi dan pemecahan masalah untuk membantu anggota BPD dalam menghadapi situasi yang kompleks
 - h. Pentingnya kerjasama BPD dengan pihak lain untuk mencapai keberhasilan tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Sasaran Kegiatan

Objek kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Tarumaja Kabupaten Bekasi. Wilayah ini berada di pantai utara yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Kecamatan Tarumajaya ini secara keseluruhan luas wilayahnya 54,63 km² yang tersebar di 7 desa dan 1 kelurahan. Terkait dengan sebaran wilayah dalam desa dan kelurahan yang menjadi wilayah kerja setiap anggota BPD, jumlah penduduk pada setiap desanya berbeda, dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Luas wilayah Kecamatan Tarumajaya berdasarkan Desa

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pusaka Rakyat	6.950	6.710	13.660
2.	Setia Asih	14.166	13.708	27.874
3.	Pahlawan Setia	4.846	4.756	9.602
4.	Setia Mulya	4.994	4.936	9.930
5.	Segara Makmur	6.388	6.105	12.493
6.	Pantai Makmur	4.485	4.310	8.795
7.	Segarajaya	7.710	7.401	15.111
8.	Samudrajaya	52.496	50.830	103.326
Kecamatan Tarumajaya		52496	50.830	103.326

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi, 2023.

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, nampak bahwa jumlah penduduk setiap desa berbeda. Jumlah yang paling banyak di Desa Setia Asih, kemudian desa Segarajaya. Pada setiap desa tersebut pemerintahan desa akan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sebarannya tidak sama. Berikut data Jumlah Dusun, RW dan RT menurut desa/kelurahan di Kecamatan Tarumajaya.

Tabel 2. Jumlah Dusun, RW dan RT di Kecamatan Tarumajaya

No	Desa/Kelurahan	Dusun	RW	RT
1.	Pusaka Rakyat	5	22	96
2.	Setia Asih	8	32	13
3.	Pahlawan Setia	5	10	41
4.	Setia Mulya	4	20	73
5.	Segara Makmur	7	22	64
6.	Pantai Makmur	7	22	43
7.	Segarajaya	8	32	81
8.	Samudrajaya	3	11	41
Kecamatan Tarumajaya		52	171	356

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi, 2023

Memperhatikan data pada tabel 2 di atas nampak bahwa sebaran dusun, RW dan RT tidak sama pada setiap desanya. Jumlah Dusun terbanyak di Desa Segara Makmur, Jumlah RW terbanyak di Desa Setia Asih dan Desa Segarajaya sementara jumlah RT terbanyak di Desa Pusaka Rakyat.

Tabel 3. Jumlah Sekdes/Kaur, Kasi, dan Kadus. Ketua RW, Ketua RT

No	Desa/Kelurahan	Sekdes/ Kaur	Kasi	Kadus, Ketua RW, Ketua RT
1.	Pusaka Rakyat	1	7	123
2.	Setia Asih	1	7	148
3.	Pahlawan Setia	1	8	56
4.	Setia Mulya	1	7	104
5.	Segara Makmur	1	7	96
6.	Pantai Makmur	1	9	72
7.	Segarajaya	1	7	84
8.	Samudrajaya	1	7	68
Kecamatan Tarumajaya		8	59	751

Sumber, BPS Kabupaten Bekasi, 2023.

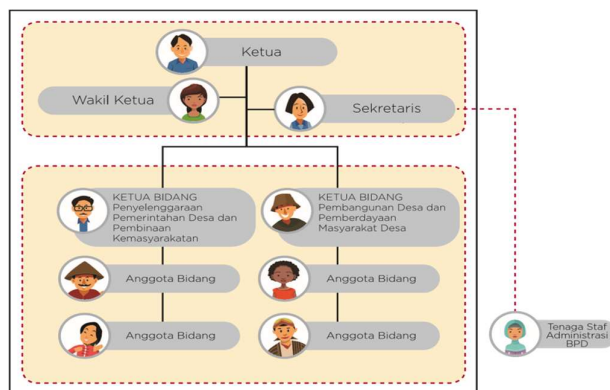
Memperhatikan data pada tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, menampung ide, aspirasi dan keinginan masyarakat berada pada 751 perangkat desa di tingkat wilayah dusun, RW dan RT. Namun dalam hal penampungan aspirasi masyarakat untuk dijadikan program dan kebijakan di tingkat desa dan untuk diusulkan pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, maka harus melalui wadah BPD. Terkait dengan jumlah anggota BPD pada setiap desa di Kecamatan Tarumajaya, nampak sama untuk setiap desa. Masing-masing memiliki 9 orang anggota BPD. Data lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Sekdes/Kaur, Kasi, dan Kadus. Ketua RW, Ketua RT

No	Desa/Kelurahan	Anggota BPD
1.	Pusaka Rakyat	9
2.	Setia Asih	9
3.	Pahlawan Setia	9
4.	Setia Mulya	9
5.	Segara Makmur	9
6.	Pantai Makmur	9
7.	Segarajaya	9
8.	Samudrajaya	9
Kecamatan Tarumajaya		72

Sumber, BPS Kabupaten Bekasi, 2020.

Jumlah anggota BPD se Kecamatan Tarunajaya sebanyak 72 orang. Ini terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Berikut ilustrasi struktur kelembagaan BPD. Jumlah yang sama untuk setiap desa tersebut sesuai dengan ketentuan baku dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Berikut dapat dilihat struktur kelembagaan BPD.



Gambar 1. Ilustrasi Struktur organisasi BPD

Struktur organisasi BPD secara nasional sama, jumlah anggota BPD sebanyak 9 orang dengan dibantu staf kesekretariatan dalam hal pelaksanaan administrasi kelembagaan. Jumlah anggota BPD yang sama sementara jumlah penduduk dan cakupan wilayah yang tidak sama pada setiap desanya, maka ini menjadi permasalahan tersendiri bagi kelembagaan BPD dan anggota BPD dalam merumuskan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan pemerintahan desa, baik dalam peraturan desa maupun keputusan kepala desa. Belum lagi kemampuan personal setiap anggota BPD juga beragam, karena tingkat pendidikan yang beragam dan pengalaman yang tidak sama.

Kegiatan *workshop* ini diharapkan kapasitas BPD dapat ditingkatkan sehingga mereka dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dengan lebih efektif dan efisien dalam memajukan desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian secara kelembagaan BPD akan betul-betul mampu menjadi mitra sejajar kepala desa dalam membuat kebijakan yang mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat.

***Workshop* Peningkatan Kapasitas Anggota BPD**

Workshop merupakan salah satu metode efektif untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD. Terkait dengan ini karena pendekatan model *workshop* yang dipergunakan, maka selain anggota BPD yang hadir sebagai peserta juga ada unsur lain seperti aparat pemerintah desa, pelaku UMKM, dari tokoh masyarakat dan dari lembaga pendidikan. Tentu saja hal ini bertujuan agar terjadi kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Upaya percepatan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat terwujud melalui kolaborasi yang sinergi antar berbagai pihak terkait.

Program kegiatan *workshop* dilaksanakan dengan tiga pemateri dari tim dosen sebagai penyelenggara. Pertama dilaksanakan presentasi materi sebagai pengantar awal untuk memberikan pengetahuan, wawasan dan pemahaman kepada peserta *workshop*. Tim

fasilitator memberikan presentasi materi terkait tugas, fungsi, dan peraturan yang mengatur BPD. Dalam presentasi dilengkapi juga dengan penjelasan, contoh kasus, dan ilustrasi yang membantu anggota BPD memahami konsep-konsep tersebut. Pada materi yang diberikan merupakan bauran antara konsep-teori dan model secara teoritis, kebijakan pemerintah dan *best practice* yang didapat dari beberapa desa yang berhasil dalam pelaksanaan pemerintahannya.



Gambar 2. Foto Fasilitator dalam *Workshop*

Sebelum materi diberikan peserta terlebih dahulu diberikan instrumen pertanyaan tertutup untuk melihat pengetahuan awal sesuai dengan topik program. Sehingga nampak *baseline* peserta atas pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama peserta dari anggota BPD.

Berikutnya dilakukan diskusi kelompok. Pada proses ini anggota BPD sebagai peserta dibagi ke dalam kelompok kecil untuk membahas topik tertentu. Diskusi kelompok memungkinkan pertukaran pendapat, kolaborasi, dan pemecahan masalah bersama. Dalam diskusi ini difasilitasi oleh fasilitator sehingga dapat tersinkronisasi dengan tujuan dari penyelenggaraan workshop.

Setelah berakhir diskusi kelompok selanjutnya peserta dipandu oleh fasilitator untuk melakukan kegiatan studi kasus. Melalui studi kasus ini para peserta akan dibawa berfikir terkait dengan contoh nyata, yang selanjutnya peserta akan diajak berfikir dan membuat hipotetis yang berkaitan dengan situasi desa atau kebijakan yang dimungkinkan telah, sedang, dan akan ditetapkan di desa masing-masing. Setiap anggota BPD yang hadir sebagai peserta dapat menganalisis kasus tersebut dan mencari solusi yang tepat.

Berkaitan dengan kerja sama dan kebutuhan adanya peranan dari pihak lain, seperti aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, pegiat ekonomi dan pendidikan, maka fasilitator melakukan kegiatan simulasi peran. Pada proses kegiatan ini fasilitator meminta anggota BPD untuk berperan sebagai pihak-pihak terlibat dalam situasi tertentu. Ini membantu

mereka memahami perspektif yang berbeda dan melatih keterampilan komunikasi dan negosiasi.



Gambar 3. Foto Peserta *Workshop* Anggota BPD

Pada kegiatan di sesi studi kasus dan latihan peran, maka di situ nampak bahwa untuk suksesnya penyelenggaraan pemerintahan desa dengan peran utamanya di BPD, lembaga BPD memerlukan dukungan dan bantuan serta kerja sama dengan empat pihak lainnya di luar BPD. Pemahaman yang mendalam tentang pentingnya peran masing-masing akan sangat membantu dimilikinya kapasitas masing-masing dengan optimal. Kebijakan desa dalam bentuk peraturan desa maupun keputusan kepala desa akan semakin lebih baik.

Sesi selanjutnya dibuka tanya jawab antara peserta *workshop* dengan fasilitator. Pada sesi ini setiap peserta anggota BPD dapat mengajukan pertanyaan terkait tugas, peraturan, atau masalah yang mereka hadapi. Dalam memberikan jawaban atas pertanyaan peserta dilakukan juga semacam latihan praktis seperti menyusun rencana kerja atau membuat keputusan simulasi. Ini membantu anggota BPD menerapkan konsep dalam konteks nyata.

Dalam *workshop* juga diberikan dengan penggunaan media visual seperti slide presentasi, video, atau gambar untuk mendukung penjelasan dan memvisualisasikan konsep. Selain itu, juga disampaikan mengenai pentingnya teknologi informasi berupa media sosial dan platform lainnya yang berkaitan dengan optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan BPD dalam pemerintahan desa.

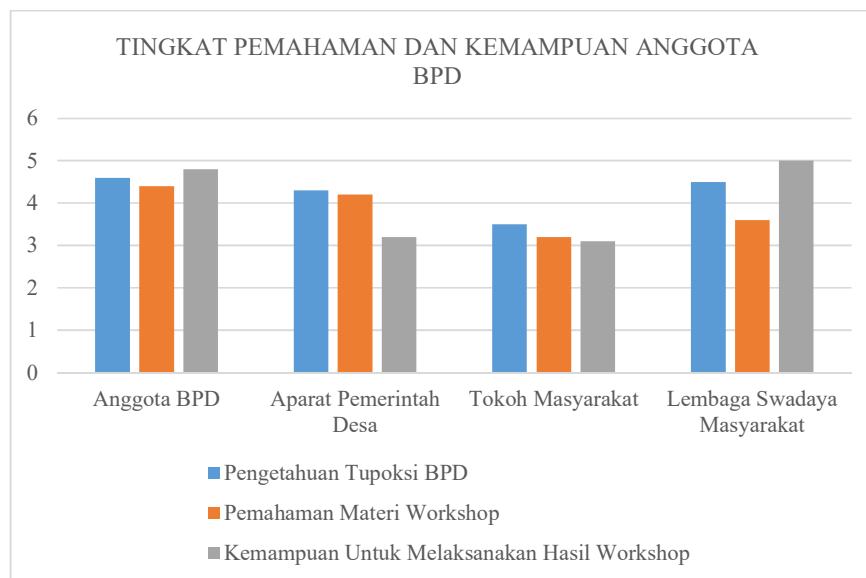


Gambar 4. foto Fasilitator dengan Sebagian Peserta *Workshop*

Kegiatan terakhir dari program *workshop* peningkatan kapasitas anggota BPD ini yaitu refleksi dan umpan balik. Kegiatan sesi akhir *workshop* mencakup waktu untuk refleksi atas apa yang dipelajari, serta memberikan umpan balik dari anggota BPD tentang pengalaman mereka dalam *workshop*. Dalam melihat umpan balik dari peserta maka seluruh peserta yang hadir diberikan instrumen pertanyaan untuk melihat bagaimana pemahaman peserta atas materi yang sudah diberikan dalam *workshop*.

Pemahaman Peserta Terkait Materi Workshop

Setelah diberikan materi dari fasilitator yang terbagi dalam beberapa sesi, berdasarkan hasil analisis evaluasi dan umpan balik peserta, nampak bahwa peserta sangat yakin dan optimis akan adanya perubahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD. Hal tersebut nampak dari analisis data pada grafik berikut:



Gambar 5. Grafik Pengetahuan, pemahaman dan Kemampuan Peserta

Berdasarkan tampilan data hasil analisis di atas, dengan skala bahwa angka 5 merupakan capaian tertinggi, dan 1 terendah, nampak bahwa pandangan peserta yang terdiri atas empat kelompok dalam peserta *workshop* menunjukkan bahwa rata-rata mereka memandang bahwa anggota BPD memiliki pengetahuan yang cukup tinggi atas tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD yang merepresentasikan masyarakat. Dalam hal pemahamanpun demikian pada pernyataan anggota BPD dan aparat pemerintah desa di atas angka 4, artinya tinggi. Sementara dalam hal keyakinan peserta bahwa anggota BPD akan mampu melaksanakan hasil *workshop* dalam pelaksanaan tugasnya sangat tinggi dalam pernyataan anggota BPD dan peserta dari lembaga swadaya masyarakat. Artinya peserta

optimis bahwa hasil dari *workshop* akan mampu dilaksanakan dengan baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

Melihat pada deskripsi analisis di atas nampak bahwa pelaksanaan *workshop* untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi cukup berhasil. Hal ini didukung juga oleh pernyataan dari beberapa Ketua BPD yang menjadi peserta dan unsur pemerintah kecamatan, mereka meyakini bahwa kegiatan *workshop* seperti ini sangat jarang dilakukan dan sangat penting bagi peningkatan kapasitas anggota BPD. Kondisi demikian sesuai dengan simpulan dari Ifrani (2022) yang menyatakan bahwa kegiatan bimbingan teknis seperti *workshop* bagi anggota BPD bermanfaat dan berguna dalam menunjang kinerja sebagai BPD, kepala desa serta aparatur pemerintah desa.

Memperhatikan data hasil analisis di atas, semakin meyakinkan bahwa *workshop* dalam upaya peningkatan kapasitas BPD dapat memberikan manfaat dan dampak positif yang signifikan bagi BPD itu sendiri, pemerintahan desa, dan masyarakat. Melalui kegiatan *workshop* tersebut para peserta memiliki peningkatan pengetahuan dan pemahaman tugas dan fungsi BPD, mereka merasa yakin bahwa melalui *workshop* ini akan mampu berkontribusi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan desa terutama dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa dan keputusan desa. Aspek penting lainnya dengan kegiatan *workshop* tersebut adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan perumusan program desa untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat semakin percaya kepada pemerintahan desa dan BPD karena keputusan desa berupa peraturan dan keputusan desa akan semakin berkualitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program kegiatan *workshop* peningkatan kapasitas anggota BPD di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi telah mampu mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Setiap sesi kegiatan terlaksana dengan baik dan peserta memiliki pengetahuan serta pemahaman sesuai dengan yang diharapkan. Pendekatan *workshop* dalam peningkatan kapasitas anggota BPD dengan dialog interaktif, studi kasus, diskusi dan tanya jawab dapat mencapai tujuan sesuai dengan sasaran peserta kegiatan. Beberapa manfaat dan dampak yang dirasakan oleh peserta antara lain: (1) peningkatan pemahaman dan pengetahuan anggota BPD tentang peran, tugas, dan tanggung jawab mereka dalam mengelola pemerintahan desa. Mereka akan lebih memahami mekanisme pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, serta aspek hukum dan regulasi yang

terkait, (2) adanya perbaikan tata kelola desa, dengan peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan anggota BPD, diharapkan akan terjadi perbaikan dalam tata kelola desa, pengelolaan keuangan desa akan lebih transparan dan akuntabel, proses pengambilan keputusan akan lebih partisipatif dan berbasis data, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan akan lebih terencana dan terarah, (3) anggota BPD akan dapat lebih efektif dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Masyarakat akan lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan masukan, serta turut serta dalam implementasi program dan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan mereka.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis pada program *workshop* peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pendekatan *workshop* di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Model kegiatan peningkatan kapasitas anggota BPD dan sejenisnya berbasis pada pemerintahan desa, yang dilakukan selanjutnya oleh lembaga atau pihak tertentu, sebaiknya melibatkan narasumber para praktisi sesuai dengan topik yang akan diberikan. Para praktisi yang dimaksud terutama yang telah mampu membawa lembaga atau masyarakatnya berhasil dalam mencapai tujuan dari kewenangan, tugas dan perannya. Dengan memberikan contoh langsung dari yang berhasil dapat memberikan motivasi bagi para peserta.
2. Kegiatan *workshop* idealnya tidak diselenggarakan hanya satu hari, melainkan dua atau tiga hari dengan penambahan materi diskusi interaktif membahas studi kasus tertentu dengan melibatkan pendamping pada setiap kelompok diskusinya. Selain itu, juga dapat menambahkan materi praktik terutama berkaitan dengan penyusunan perencanaan program pemerintahan desa, penyusunan anggaran pembangunan desa dan teknik negosiasi serta kerja sama yang lebih praktis.
3. Pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan sebagai lokasi dan tuan rumah kegiatan, sebaiknya lebih fleksibel dalam memberikan dukungan terutama fasilitas dan sarana pendukung lainnya yang lebih nyaman bagi peserta. Karena suasana yang kondusif sangat mendukung tercapainya tujuan dari kegiatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Universitas Islam 45 melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang telah memberikan dukungan melalui dana program PkM untuk tahun anggaran 2022-2023. Melalui dana program tersebut akhirnya

program pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dapat terselenggara dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ifrani, I. (2022). PENGELOLAAN, Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). *Jahjur: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Martulesi, Y. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Di Koto Taluk Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Ndraha, M. I. K., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Penguatan Komunikasi Antara Pemerintah Desa dan BPD Untuk Menghasilkan Produk Regulasi Desa Yang Berkualitas Di Desa Lolozasai Kecamatan Gido. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(4), 1373-1380.
- Nurpitasari, R. D., & Maharani, A. E. P. (2020). Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Kaitannya Dengan Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa. *Res Publica*, 4(3), 289-302.
- Muhtadli, M., Wijaya, R., & Septiana, R. (2022). Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perspektif Demokrasi (Studi Pada BPD Desa Karyamulyasari Kecamatan Candipuro Lampung Selatan). *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 125-139.
- Prihatin, P. S. (2016). Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 2(2), 123-130.
- Umami, U. N., & Khaidir, A. (2019). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Demokrasi Pembangunan Desa. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), 58-66.
- Wowor, S. (2015). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa (suatu Studi di Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat) 1. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1098.
- Zitri, I., Rifaid, R., & Umami, R. (2022). Mendukung Penguatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Bongkot Dalam Penyusunan Perdes Pembentukan Bumdes. *Jces (Jurnal Masyarakat Pendidikan Karakter)*, 5 (3), 726-738.